



Kepentingan Aktor Lokal dalam Implementasi Kebijakan Peningkatan Produktivitas Pertanian

Studi Kasus di Kelurahan Rantau Indah, Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Anjar Dwi Arvita^{1*}, Nasuhaidi², Galank Pratama³, Muliono⁴

¹⁻⁴Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia

Email: anjardwiarvita10@gmail.com^{1*}, nasuhaidi@unja.ac.id², galankpratama@unja.ac.id³, muliono@unja.ac.id⁴

*Penulis Korespondensi: anjardwiarvita10@gmail.com

Abstract. *The implementation of agricultural productivity improvement policies is an important effort to increase agricultural production and improve farmers' welfare. Policy implementation is influenced not only by program design and resource availability but also by the interests of actors involved in the implementation process. This study aims to analyze actor interests in the implementation of agricultural productivity improvement policies in Rantau Indah Village, Tanjung Jabung Timur Regency. This research employed a qualitative descriptive approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving representatives of the Food Crops and Horticulture Office, Agricultural Extension Workers, village government officials, farmer group leaders, and community leaders. The findings indicate that each actor has different interests in policy implementation, reflecting their respective institutional roles, responsibilities, and expectations. These differences influence program planning, coordination, decision-making, and policy execution. Nevertheless, effective communication, collaboration, and coordination among stakeholders contribute positively to minimizing conflicts of interest and supporting policy implementation. The active involvement of farmer groups and agricultural extension workers also strengthens the dissemination of agricultural innovations and encourages community participation in improving productivity. The study concludes that actor interests constitute an important factor influencing the implementation of agricultural productivity improvement policies in Rantau Indah Village. Therefore, strengthening stakeholder collaboration, improving institutional coordination, and ensuring transparent communication are essential to achieving sustainable agricultural development and enhancing farmers' welfare.*

Keywords: Actor Interests; Agricultural Productivity; Local Politics; Merilee S. Grindle; Policy Implementation.

Abstrak. Implementasi kebijakan peningkatan produktivitas pertanian merupakan salah satu upaya penting untuk meningkatkan hasil produksi pertanian sekaligus kesejahteraan petani. Pelaksanaan kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh desain program dan ketersediaan sumber daya, tetapi juga oleh kepentingan para aktor yang terlibat dalam proses implementasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepentingan aktor dalam implementasi kebijakan peningkatan produktivitas pertanian di Desa Rantau Indah, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan perwakilan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Penyuluh Pertanian Lapangan, aparatur pemerintah desa, ketua kelompok tani, serta tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap aktor memiliki kepentingan yang berbeda sesuai dengan peran, tanggung jawab, dan harapan institusinya. Perbedaan kepentingan tersebut memengaruhi proses perencanaan program, koordinasi, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kebijakan. Meskipun demikian, komunikasi, kolaborasi, dan koordinasi yang efektif antaraktor mampu meminimalkan konflik kepentingan serta mendukung implementasi kebijakan. Keterlibatan aktif kelompok tani dan penyuluh pertanian juga memperkuat penyebaran inovasi pertanian serta mendorong partisipasi masyarakat dalam meningkatkan produktivitas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepentingan aktor merupakan faktor penting yang memengaruhi implementasi kebijakan peningkatan produktivitas pertanian di Desa Rantau Indah. Oleh karena itu, penguatan kolaborasi antaraktor, peningkatan koordinasi kelembagaan, dan komunikasi yang transparan diperlukan untuk mewujudkan pembangunan pertanian yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan petani.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Kepentingan Aktor; Merilee S. Grindle; Politik Lokal; Produktivitas Pertanian.

1. LATAR BELAKANG

Implementasi kebijakan peningkatan produktivitas pertanian merupakan salah satu instrumen pemerintah daerah dalam meningkatkan hasil produksi pertanian, memperkuat ketahanan pangan, dan mendorong peningkatan kesejahteraan petani. Keberhasilan implementasi kebijakan tersebut tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan program, anggaran, maupun sarana pendukung, tetapi juga dipengaruhi oleh aktor-aktor yang terlibat dalam proses pelaksanaannya (Rahman, 2022). Penelitian ini membahas kepentingan aktor dalam implementasi kebijakan peningkatan produktivitas pertanian di Kelurahan Rantau Indah, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Fokus penelitian diarahkan pada identifikasi kepentingan yang dimiliki oleh aktor-aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan serta bagaimana kepentingan tersebut memengaruhi pelaksanaan program peningkatan produktivitas pertanian di tingkat lokal.

Kepentingan aktor merupakan salah satu aspek penting dalam implementasi kebijakan publik. Menurut Grindle (1980), implementasi kebijakan tidak berlangsung dalam kondisi yang netral, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan, kekuasaan, dan hubungan antaraktor yang terlibat dalam proses pelaksanaannya. Setiap aktor memiliki tujuan dan kepentingan yang berbeda sesuai dengan posisi dan kewenangannya. Dalam implementasi kebijakan peningkatan produktivitas pertanian terdapat beberapa aktor utama yang terlibat, yaitu Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), pemerintah kelurahan, tokoh masyarakat, dan kelompok tani. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura berkepentingan mencapai target pembangunan sektor pertanian yang telah ditetapkan pemerintah daerah. PPL berkepentingan memastikan keberhasilan pendampingan dan pelaksanaan program di lapangan. Pemerintah kelurahan berkepentingan menjaga kredibilitas serta akuntabilitas rekomendasi yang diberikan kepada kelompok tani. Sementara itu, kelompok tani berkepentingan memperoleh akses terhadap bantuan, sarana produksi, dan berbagai program yang dapat mendukung peningkatan produktivitas usaha tani mereka. Perbedaan kepentingan tersebut berpotensi memengaruhi proses pengambilan keputusan, penentuan prioritas program, serta distribusi manfaat kebijakan kepada kelompok sasaran.

Penelitian mengenai implementasi kebijakan pertanian telah dilakukan oleh berbagai peneliti sebelumnya. Ulfah et al. (2024) menemukan bahwa keberhasilan program pertanian dipengaruhi oleh strategi organisasi dan kemampuan Dinas Pertanian dalam mengelola sumber daya yang tersedia. Wijaya et al. (2018) menunjukkan bahwa peningkatan produktivitas pertanian sangat dipengaruhi oleh peran pemerintah daerah melalui program pembinaan dan pemberdayaan petani. Sementara itu, Muchamad (2023) menjelaskan bahwa implementasi

kebijakan di tingkat lokal sering kali dipengaruhi oleh dinamika kepentingan para aktor yang terlibat dalam proses kebijakan. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak membahas strategi organisasi, efektivitas program, dan peran lembaga pemerintah dalam implementasi kebijakan pertanian. Penelitian yang secara khusus menelaah kepentingan aktor dalam implementasi kebijakan peningkatan produktivitas pertanian pada tingkat kelurahan masih relatif terbatas. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk memahami bagaimana kepentingan aktor memengaruhi pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal.

Kelurahan Rantau Indah merupakan salah satu wilayah pertanian di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang menjadi sasaran pelaksanaan program peningkatan produktivitas pertanian. Wilayah ini memiliki beberapa kelompok tani aktif dengan karakteristik wilayah, kondisi lahan, serta tantangan yang berbeda dalam menjalankan usaha pertanian. Perbedaan kondisi tersebut menyebabkan kebutuhan kelompok tani juga berbeda, baik dalam bentuk bantuan, pendampingan, maupun dukungan program lainnya. Dalam proses implementasi kebijakan, berbagai aktor terlibat dalam menentukan prioritas program, menyalurkan bantuan, memberikan pendampingan, dan memfasilitasi kebutuhan kelompok tani. Kondisi ini menjadikan Kelurahan Rantau Indah sebagai lokasi yang relevan untuk mengkaji bagaimana kepentingan aktor memengaruhi implementasi kebijakan peningkatan produktivitas pertanian.

Pemahaman terhadap kepentingan aktor menjadi penting karena dapat membantu menjelaskan mengapa suatu kelompok lebih mudah memperoleh akses program dibandingkan kelompok lainnya, serta bagaimana proses pengambilan keputusan berlangsung dalam implementasi kebijakan pertanian di tingkat lokal. Penelitian ini berfokus pada kepentingan aktor formal dan informal yang terlibat dalam implementasi kebijakan pertanian melalui perspektif teori Merilee S. Grindle, yang membedakannya dari penelitian terdahulu yang lebih banyak menyoroiti strategi organisasi dan efektivitas program. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis kepentingan aktor dalam implementasi kebijakan peningkatan produktivitas pertanian di Kelurahan Rantau Indah, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini menggunakan teori *Politics and Policy Implementation in the Third World* yang dikemukakan oleh Grindle (1980). Menurut Grindle, implementasi kebijakan tidak hanya dipahami sebagai proses administratif, tetapi juga sebagai proses politik yang dipengaruhi oleh kepentingan aktor, distribusi kekuasaan, serta interaksi antaraktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi kebijakan

tidak hanya ditentukan oleh isi kebijakan, tetapi juga oleh kondisi lingkungan tempat kebijakan tersebut dijalankan.

Grindle (1980) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua dimensi utama, yaitu *content of policy* dan *context of implementation*. *Content of policy* berkaitan dengan kepentingan yang dipengaruhi, manfaat yang dihasilkan, kelompok sasaran, serta sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan. Sementara itu, *context of implementation* berkaitan dengan aktor yang terlibat, hubungan kekuasaan, karakteristik lembaga pelaksana, dan respons kelompok sasaran terhadap kebijakan yang dijalankan.

Dalam penelitian ini, teori Grindle digunakan untuk menganalisis kepentingan aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan peningkatan produktivitas pertanian di Kelurahan Rantau Indah, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Fokus analisis diarahkan pada kepentingan aktor lokal serta pengaruhnya terhadap pelaksanaan kebijakan pertanian di tingkat lokal.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian dilakukan di Kelurahan Rantau Indah, Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang merupakan salah satu wilayah pelaksanaan program peningkatan produktivitas pertanian. Informan penelitian dipilih secara purposive yang terdiri atas Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), Lurah Kelurahan Rantau Indah, ketua kelompok tani, dan tokoh masyarakat yang terlibat dalam implementasi kebijakan pertanian.

Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai informan dan dokumen pendukung yang relevan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik Implementasi Kebijakan Pertanian di Kelurahan Rantau Indah

Implementasi kebijakan peningkatan produktivitas pertanian di Kelurahan Rantau Indah melibatkan berbagai aktor yang memiliki peran dan kewenangan berbeda dalam proses pelaksanaannya. Aktor tersebut terdiri atas Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), pemerintah kelurahan, tokoh masyarakat, dan kelompok tani sebagai kelompok sasaran kebijakan.

Keterlibatan berbagai aktor tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pertanian tidak hanya berlangsung sebagai proses administratif, tetapi juga sebagai proses politik yang melibatkan interaksi antaraktor dalam mencapai tujuan kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan peningkatan produktivitas pertanian diawali dengan proses identifikasi kebutuhan kelompok tani yang dilakukan melalui koordinasi antara kelompok tani, pemerintah kelurahan, dan penyuluh pertanian. Usulan kebutuhan tersebut kemudian disampaikan kepada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura untuk dipertimbangkan dalam penyusunan program dan penentuan prioritas bantuan. Dalam proses tersebut, berbagai pertimbangan teknis dan administratif digunakan sebagai dasar dalam menentukan kelompok penerima program.

Dalam perspektif Merilee S. Grindle (1980), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasi (*context of implementation*). Pada aspek isi kebijakan, program peningkatan produktivitas pertanian dirancang untuk meningkatkan hasil produksi pertanian melalui pemberian bantuan sarana produksi, alat dan mesin pertanian, pelatihan, serta kegiatan pendampingan kepada petani. Program tersebut ditujukan untuk mendukung peningkatan kapasitas kelompok tani dan mendorong peningkatan produktivitas pertanian di tingkat lokal.

Sementara itu, pada aspek konteks implementasi, pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh hubungan antaraktor yang terlibat dalam proses implementasi. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura memiliki kewenangan dalam perencanaan dan penyaluran program, PPL berperan sebagai pendamping teknis di lapangan, pemerintah kelurahan berfungsi sebagai fasilitator, sedangkan kelompok tani menjadi penerima manfaat kebijakan. Interaksi antaraktor tersebut membentuk dinamika implementasi yang memengaruhi pelaksanaan program pertanian di Kelurahan Rantau Indah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antaraktor menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Komunikasi yang terjalin antara Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, PPL, pemerintah kelurahan, dan kelompok tani memudahkan proses penyampaian informasi program serta identifikasi kebutuhan kelompok tani. Namun demikian, implementasi kebijakan masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan sumber daya, perbedaan kebutuhan kelompok tani, dan kondisi geografis wilayah yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan program.

Dengan demikian, implementasi kebijakan peningkatan produktivitas pertanian di Kelurahan Rantau Indah menunjukkan bahwa kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh desain program yang telah ditetapkan pemerintah, tetapi juga oleh dinamika hubungan antaraktor yang

terlibat dalam proses implementasinya. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada kemampuan aktor dalam membangun koordinasi dan kerja sama untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.

Kepentingan Aktor Lokal dalam Implementasi Kebijakan Pertanian

Implementasi kebijakan peningkatan produktivitas pertanian di Kelurahan Rantau Indah melibatkan berbagai aktor yang memiliki kepentingan berbeda sesuai dengan posisi, kewenangan, dan tujuan yang ingin dicapai. Perbedaan kepentingan tersebut menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses implementasi kebijakan karena setiap aktor berupaya mewujudkan tujuan yang dianggap penting dalam pelaksanaan program pertanian. Dalam perspektif Merilee S. Grindle (1980), kepentingan aktor merupakan salah satu faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan karena dapat menentukan bentuk dukungan, strategi, dan tindakan yang dilakukan selama proses pelaksanaan kebijakan.

Kepentingan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura memiliki kepentingan untuk mencapai target pembangunan sektor pertanian yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Kepentingan tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan berbagai program peningkatan produktivitas pertanian, seperti pemberian bantuan sarana produksi, alat dan mesin pertanian, pelatihan, serta pendampingan kepada kelompok tani. Selain itu, dinas berkepentingan memastikan bahwa program yang dijalankan mampu memberikan dampak terhadap peningkatan hasil produksi pertanian dan kesejahteraan petani. Oleh karena itu, setiap program yang dilaksanakan diarahkan untuk mendukung pencapaian target pembangunan pertanian daerah secara efektif dan berkelanjutan.

Kepentingan Penyuluh Pertanian Lapangan

Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa program yang dirancang oleh pemerintah dapat diterapkan dengan baik oleh kelompok tani. Dalam pelaksanaan kebijakan, PPL berperan sebagai penghubung antara pemerintah dengan petani melalui kegiatan pendampingan, penyuluhan, dan pembinaan teknis. Kepentingan utama PPL adalah meningkatkan kapasitas petani serta memastikan bantuan dan program yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal. Keberhasilan kelompok tani dalam menerapkan program pertanian juga menjadi indikator keberhasilan pendampingan yang dilakukan oleh PPL.

Kepentingan Pemerintah Kelurahan

Pemerintah Kelurahan Rantau Indah memiliki kepentingan untuk mendukung keberhasilan program pembangunan yang dilaksanakan di wilayahnya. Dalam implementasi

kebijakan pertanian, pemerintah kelurahan berkepentingan menjaga koordinasi antara kelompok tani dengan instansi pemerintah serta memastikan kebutuhan masyarakat dapat tersampaikan kepada pihak yang berwenang. Selain itu, keberhasilan program pertanian juga berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menjadi salah satu tujuan pembangunan di tingkat kelurahan.

Kepentingan Kelompok Tani

Kelompok tani merupakan aktor yang secara langsung menerima manfaat dari implementasi kebijakan peningkatan produktivitas pertanian. Kepentingan utama kelompok tani adalah memperoleh akses terhadap bantuan, sarana produksi, pelatihan, dan berbagai program yang dapat mendukung peningkatan hasil pertanian. Selain itu, kelompok tani juga berkepentingan meningkatkan produktivitas usaha tani serta memperoleh keuntungan ekonomi yang lebih baik dari kegiatan pertanian yang dijalankan. Kepentingan tersebut mendorong kelompok tani untuk berpartisipasi dalam berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun setiap aktor memiliki kepentingan yang berbeda, seluruh aktor pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu mendukung peningkatan produktivitas pertanian di Kelurahan Rantau Indah. Perbedaan kepentingan tersebut tidak menimbulkan konflik yang signifikan, melainkan membentuk pola interaksi yang saling melengkapi dalam pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, implementasi kebijakan peningkatan produktivitas pertanian tidak hanya dipengaruhi oleh isi kebijakan yang dirancang pemerintah, tetapi juga oleh kepentingan aktor yang terlibat dalam proses pelaksanaannya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan peningkatan produktivitas pertanian di Kelurahan Rantau Indah dipengaruhi oleh kepentingan aktor yang terlibat di dalamnya, selaras dengan perspektif Grindle (1980). Dinas Pertanian berorientasi pada target RPJMD, PPL pada capaian kinerja pendampingan, pemerintah kelurahan pada kredibilitas rekomendasi, sedangkan kelompok tani pada pemenuhan kebutuhan usaha tani mereka.

Perbedaan kepentingan tersebut memengaruhi proses pengambilan keputusan, penentuan prioritas program, dan distribusi manfaat kebijakan. Kelompok tani dengan kapasitas organisasi lebih baik dan komunikasi lebih intensif dengan PPL cenderung lebih mudah mengakses program, sementara kelompok yang menghadapi keterbatasan kapasitas dan geografis memerlukan waktu lebih panjang dalam proses tersebut.

Berdasarkan temuan tersebut, pemerintah daerah perlu memperkuat mekanisme koordinasi yang lebih responsif dan inklusif terhadap keragaman kondisi kelompok tani. PPL perlu memastikan pendampingan yang lebih merata, dan pemerintah kelurahan perlu memperkuat perannya sebagai fasilitator aktif bagi seluruh kelompok tani.

DAFTAR REFERENSI

- Anwar, K., Heriyanto, M., & Tampubolon, D. (2018). Strategi politik dalam penataan lembaga petani di Desa Rambah Muda, Riau. *Sorot: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 13(1), 37–52. <https://doi.org/10.31258/sorot.13.1.5366>
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Febrianto Syam. (2022). Dinamika kebijakan program pengembangan pertanian di Indonesia. *Madika: Jurnal Politik dan Governance*, 2(1), 52–66. <https://doi.org/10.24239/madika.v2i1.1030>
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and policy implementation in the third world*. <https://doi.org/10.1515/9781400886081>
- Hermanto. (2009). Reorientasi kebijakan pertanian dalam perspektif pembangunan berwawasan lingkungan dan otonomi daerah. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 7(4), 369–383.
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Muchamad, P. I. (2023). Politik implementasi kebijakan pangan: Kontradiksi kebijakan komoditas jagung pemerintahan Joko Widodo–Jusuf Kalla 2014–2019. *JDPL Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal*, 5(1), 1–17.
- Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. (2023). *Rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024* (Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023). Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. (2024). *Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025–2029*. Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 Nomor 4.
- Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. (2025). *Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025–2029*. Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025 Nomor 1.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Ulfah, S. R. B., Putera, R. E., & Kusdarini, K. (2024). Strategi Dinas Pertanian dalam pelaksanaan program unggulan sektor pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar. *Gema Publica*, 9(2), 115–131. <https://doi.org/10.14710/gp.9.2.2024.34-49>

- Wijaya, A. K., Noor, M., & Surya, I. (2018). Strategi Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan dalam meningkatkan produktivitas pertanian di Kelurahan Tani Aman Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda. *E-Journal Ilmu Pemerintahan*, 6(2), 737–748.
- Wongkar, B., Pangemanan, F., & Kumayas, N. (2023). Strategi Dinas Pertanian dalam meningkatkan produktivitas tanaman hortikultura di Kecamatan Modoinding. *Jurnal Governance*, 3(1), 1–13.
- Rahman, A. (2022). Agricultural transformation in Indonesia: Evaluation of policy implementation and challenges faced. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 12(2). <https://doi.org/10.26858/jiap.v12i2.50367>